

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonymous. *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik* Terjemahan dari *Handbook – Curbing Corruption in Public Procurement*, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2007).
- Anonymous. *Integrity in Public Procurement (Good Practice from A to Z)*. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). 2007.
- Baily, Peter, David Farmer, Barry Crocker, and David Jessop, *Purchasing Principles and Management*. London: Pearson Education Limited. 2013.
- Case, Donald O. *Looking for Information: A survey of research on information seeking, Needs, and Behavior*. Amsterdam: Academic Press. 2002.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2016.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2005.
- GB, Notrida, and Mandica Nur, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*. Jakarta: Indonesian Research and Development Institute (IRDI). 2009.
- Hapiz, M. *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2021.
- Laloo, Bikika Tariang. *Information Needs, Information Seeking Behaviour and Users*. New Delhi: ESS Publications. 2002.

- MA, Faisar Ananda Arfa, and Watni Marpaung, M.A.. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2010.
- Narayana, Gede, Romanus Ndaud Lendong, Muhammad Syahyan, Cecep Suryadi, Wafa Patria Umma, Abdul Rahman Ma'mun, and Evy Trisub, *Bunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Informasi Pusat RI, 2020).
- Sakarpurnama, Eko, Lina Miftahul Jannah, Muh. Azis Muslim, and Desy Hariyati. *Membuka Informasi Menuju Good Governance: Sebuah Telaah Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surakarta dan Lombok Barat*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). 2012.
- Sastro, Dhoho A., M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, and Tandiono Bawor. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 2010.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, and Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press. 2011.
- Suherman, Ade Maman. *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement)*. Jakarta: PT. Raja Wali Pers. 2010.
- Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.

Jurnal

Amiruddin. "Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 19. No. 1. (Juni 2012).

Berliani, Citra, Rina Yulianti, and Oman Supriyadi. "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon". *JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 4. No. 1. (April, 2022). <https://doi.org/10.32938/jan.v4i1.2596>.

Febriananingsih, Nunuk. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 1. No. 1. (April, 2022).

Fuad, Ahmad Nur, Arbaiyah, Syafiq Mughni, and Achmad Jainuri. "Islam and Humas Rights in Indonesia: An Account of Muslim Intellectuals' Views*?". *Jurnal Al-Jami'ah*. Vol. 45. No. 2. (2007).

Kamaliah, Khairunnisa. "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. (2015).

Muhaimin. "Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 12. (2018).

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. (2020).

Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang". *Jurnal SASI*. Vol. 23. No. 2. (Juli-Desember 2017): 167-188
<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.

- Putra, Cakra Mandala, Muhammadiyah, and Abdi. "Transparansi Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar". *Jurnal KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*. Vol. 2. No. 6. (2021).
- Ricky, and Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. "Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)". *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol. 12. No. 2. (Oktober 2022).
- Roy, Subir Kumar. "The Principle of Sustainable Development, Human Rights and Good Governance". *Brawijaya Law Journal*. Vol. 3. No. 2. (2016).
- Suhendar, Ade. "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju *Good Governance* (Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)". *Jurnal Wacana Kinerja*. Vol. 13. No. 2 (November 2020): 243-251.
- Sukmawati, and Alwi. "Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Parepare". *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 8. (2019).
- Syafar, Irfan, La Ode Husen, and Askari Razak. "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol. 3. No. 3. (2022).
- Syam, Fauzi. "Hak Atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi". *Jurnal Inovatif*. Vol. 8. No. 1. (Januari 2015).

- Wibawa, Kadek Cahya Susila. “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2. No. 2. (Juni, 2019).
- Wibowo, Richo Andi. “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)”. *Integritas*. Vol. 1. No. 1. (November 2015).

Artikel/Website

- Anonymous. Bingkai Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga Pemerintahan. *Biro Hukum IPB University*. Juni 27, 2023.
- Anonymous. *Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2018.
- Anonymous. Pengertian, Prinsip, dan Penerapan Good Governance di Indonesia. *Pemerintah Kabupaten Buleleng Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomsetda)*. Mei 22, 2017.
- Anonymous. Perpres 16/2018 Lahir Untuk Jadi Jawaban Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Direktorat Jenderal Bina Konstruksi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. April, 2018.
- Anonymous. Perpres Nomor 16 Tahun 2018: Pedoman Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Sustainable Indonesia (SustaIN)*. Juli 23, 2018.
- Anonymous. Pusat Edukasi Antikorupsi, Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi Terhadap Perekonomian Negara. Januari 13, 2023.

- Anonymous. *Rencana Strategis 2022-2026*. (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2022).
- Anonymous. Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Semarang Kelas IA*.
- Arfian, Muhammad. Skripsi: “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2017.
- Ati, Sri, Nurdien, Kistanto, and Amin Taufik. *Modul 1: Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan*. Universitas Terbuka.
- ET, Christian, Dewi Anggraeni P., Sigit Wijaya, and Siti Juliantari R., *Laporan Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat: Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019.
- Hidayah, Ayu Liestianingsih. 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. April 12, 2023.
- Juliantari, Siti. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*. Januari 25, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Pada KBBI Daring 2016).
- Kusnadi. *Modul 01: Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Universitas Terbuka.

Lubis, Abu Samman. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?. *Kementerian Keuangan Badan dan Pelatihan Keuangan*, Agustus 7, 2014.

Mangkunegara, Irfan. Supply and Demand dalam Suap. *Artikel LinkedIn Pribadi*. Oktober 9, 2018.

Oxford Learners Dictionary. (Pada Oxford Learners Dictionary 2024).

Prabowo, Kunto. Skripsi: “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2007.

Syeh, Fathur Firman. Skripsi: “*Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan*”. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2022.

Surat Kabar

Aulia, Aly. “Ramadan dan Etika Mengelola Informasi”. *Harian Jogja*. 21 Juni 2016.